

POLA PENJAMINAN MUTU PADA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL BERBASIS NILAI-NILAI SEKOLAH

Asep Sunandar, Sunarni, Desi Eri Kusumaningrum

FIP Universitas Negeri Malang, Jln. Semarang 5 Malang
e-mail: asepsun@gmail.com

Abstract: Quality Assurance in *Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional* (Pre-international Schools) Based on School Values. The present research project is aimed at describing the process of quality management in *Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional* (Pre-international Schools) in Malang and Bandung. The study is also set to explore school values attributable to educational quality assurance. While the process of quality management is explored using Failure Mode and Effects Analysis, the school values are identified and calculated using factorial analysis. The results show that, on average, students and teachers tend to categorize the quality into “kemungkinan gagal sedikit” (slightly potentially failed) and “kemungkinan gagal dalam jumlah yang langka” (unlikely failed). The study also found 10 school values relevant to educational quality assurance.

Keywords: quality assurance, school values, pre-international schools

Abstrak: Pola Penjaminan Mutu pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Berbasis Nilai-Nilai Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi proses manajemen mutu di SMA Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Malang dan Bandung, dan menggali nilai-nilai sekolah yang berpengaruh terhadap penjaminan mutu pendidikan. Deskripsi proses penjaminan mutu yang dilaksanakan di sekolah digali dengan menggunakan metode FMEA (*Failure Mode and Effects Analysis*) dengan teknik analisis statistik deskriptif, sedangkan penggalan nilai-nilai sekolah dilakukan dengan teknik analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata responden siswa dan guru mempersepsi kondisi proses pendidikan pada kategori “kemungkinan gagal sedikit” dan “kemungkinan gagal dalam jumlah yang langka”. Penelitian ini juga menemukan 10 nilai-nilai sekolah yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan.

Kata kunci: penjaminan mutu, nilai-nilai sekolah, RSBI

Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) gencar diberitakan di berbagai media cetak dan elektronik. Pokok pangkal pemberitaannya adalah mahal biaya sekolah dan ketidakpuasan masyarakat atas pencapaian prestasi siswa-siswi RSBI serta hasil evaluasi RSBI yang menyatakan selama lima tahun berjalan RSBI tidak mampu menghasilkan satu sekolah pun yang menyandang predikat sebagai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) (Kompas, 4 Januari 2012). Mencermati berbagai pemberitaan tersebut, terdapat dua permasalahan utama yang mengakibatkan ketidakberhasilan program RSBI, yaitu rendahnya mutu akademik dan tidak terpenuhinya persyaratan administratif suatu sekolah dijadikan SBI. Dirjen Dikdas Kemendikbud menyatakan bahwa ketidaktercapaian

RSBI karena sekolah belum mampu memenuhi persyaratan kualifikasi akademik guru yang mengharuskan 10 persen guru berpendidikan S2 untuk jenjang SD, 20 persen berpendidikan S2/S3 untuk SMP, dan 30 persen berpendidikan S2/S3 untuk SMA (Jawa Pos, 4 Januari 2012).

Padahal, apabila dicermati lebih mendalam, permasalahan utamanya bukan pada kualifikasi guru yang belum terpenuhi, melainkan pada kualitas akademik yang masih rendah. Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan tujuan RSBI di antaranya adalah “...daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal di tingkat

internasional; kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan bentuk penghargaan internasional lainnya". Kedua tujuan tersebut menyatakan bahwa RSBI harus memiliki kualitas yang setara dengan kualitas pendidikan di negara maju, bahkan pencapaian tersebut harus dibuktikan dengan perolehan berbagai penghargaan.

Kebijakan sekolah bertaraf internasional memunculkan beragam pemahaman di antara para pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan. Secara umum, Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 memang menyebutkan bahwa SBI adalah Sekolah Standar Nasional (SSN) yang ditambah muatan keunggulan yang diadopsi dari sekolah di negara maju. Namun hal tersebut tentunya belum memberikan penjelasan yang komprehensif, SSN+X itu sangat multi tafsir. Seperti halnya penelitian Maryati (2007) yang membahas pemahaman para kepala sekolah penyelenggara RSBI, di antara pemahaman para kepala sekolah tersebut menyatakan SBI sebagai sekolah dengan acuan kurikulum nasional dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ada juga yang mendefinisikan SBI adalah sekolah yang fasilitasnya lengkap dan modern serta menggunakan bahasa Inggris.

Pemahaman tersebut tentunya hanya bersifat sempalan dari tujuan SBI yang sebenarnya. Pada tahapan ini perlu kiranya diluruskan makna SBI yang sebenarnya agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi komoditas jualan sekolah. Maryati (2007) menjelaskan beberapa kriteria yang dapat menjelaskan makna SBI. Beberapa kriteria yang menjadi dasar untuk mendapatkan status SBI, antara lain, (1) peningkatan mutu sekolah harus setara dengan sekolah internasional dan memperoleh akreditasi dari lembaga internasional; (2) guru dan kepala sekolah harus memperoleh sertifikasi dan/atau lisensi internasional; (3) peningkatan mutu sekolah harus dilandasi suatu rencana yang menggunakan pendekatan *bottom up*; adanya partisipasi masyarakat, pemda provinsi, dan pemda kota selama proses peningkatan mutu sampai pencapaian standar internasional; melibatkan instansi profesional untuk menjamin keberlanjutan sekolah bertaraf internasional; bermitra dengan sekolah luar negeri sehingga lulusannya dapat diterima di perguruan tinggi luar negeri.

Berkaca kepada beberapa indikator tersebut, tampak jelas bahwa yang namanya SBI tidak hanya sekadar menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran dan mutakhirnya fasilitas sekolah. Terdapat pemaknaan yang komprehensif dan holistik dalam mendefinisikan SBI. SBI seharusnya merupakan upaya pengembangan dan pencapaian mutu proses dan mutu hasil yang terus berkembang kearah kemajuan.

Dalam upaya pencapaian mutu secara berkesinambungan diperlukan adanya standar. Terdapat beberapa standar mutu yang dikemukakan oleh beberapa organisasi dunia. Salah satu di antaranya adalah standar mutu yang dikeluarkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO). Crenova (2000) menjelaskan bahwa ISO adalah standar internasional yang berisi tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga (barang maupun jasa) apabila lembaga tersebut ingin menunjukkan bahwa sistem manajemen lembaga tersebut mempunyai kemampuan dalam memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan lain yang sesuai dalam bidang mutu, baik mutu produk maupun mutu proses, guna mencapai kepuasan pelanggan.

Dalam menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu yang berstandar ISO, organisasi yang bersangkutan harus dapat menunjukkan kemampuannya untuk menyediakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku secara konsisten. Selain itu, organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif dan juga melaksanakan proses peningkatan sistem secara berkelanjutan.

Proses penjaminan mutu membutuhkan adanya nilai-nilai yang diyakini oleh perangkat sekolah dan menjiwai seluruh proses kegiatan pendidikan. Nilai sekolah dapat dimaknai sebagai sesuatu pandangan yang dianggap baik dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan proses pendidikan di sekolah. Nilai menyatakan keyakinan-keyakinan dasar bahwa suatu perilaku secara pribadi atau sosial dapat diterima atau tidak. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam arti nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik atau diinginkan.

Secara konstruktif nilai juga dapat dipahami sebagai pola kerja atau sesuatu yang melandasi dalam pelaksanaan pekerjaan. George & Jones (1996) menyebutnya sebagai *work values*, yaitu *guide ethical behavior at work*. Beberapa nilai yang dipandang dapat menjadi *guide* dalam pelaksanaan pekerjaan adalah nilai kejujuran, dapat dipercaya, dan membantu orang lain. Nilai-nilai kerja tersebut dapat berlaku universal, walaupun konteks penjelasan George berlatar organisasi bisnis, namun nilai-nilai yang dikemukakan dapat diterapkan pada organisasi pendidikan dan lainnya.

Atas dasar pemahaman nilai tersebut, beberapa kategori yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah ketetapan organisasional, budaya disiplin yang dikembangkan di sekolah, pola interaksi antar-individu, proses pembelajaran yang diharapkan, dan

kesiapan dalam menghadapi kompetisi dan peningkatan mutu. Unsur-unsur nilai tersebut memiliki implikasi dalam penciptaan suatu model penjaminan mutu pendidikan. Kaidah-kaidah tersebut apabila diinternalisasikan dalam pekerjaan pendidikan akan menjadi suatu budaya mutu yang secara integratif menjadi bagian dalam kehidupan pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan dan kepala sekolah.

Sejalan dengan latar tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan (*existing condition*) proses manajemen mutu di SMA RSBI di Malang dan Bandung, dan menggali nilai-nilai sekolah yang berpengaruh terhadap penjaminan mutu pendidikan.

METODE

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian difokuskan pada dua permasalahan pokok, yaitu proses penjaminan mutu yang selama ini diterapkan di sekolah dan nilai-nilai sekolah yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam perumusan formula penjaminan mutu. Deskripsi tentang proses penjaminan mutu yang dilaksanakan di sekolah digali dengan menggunakan metode *Failure Mode and Effects Analysis* (FMEA) dengan teknik analisis statistik deskriptif. Keandalan metode ini adalah memiliki kekuatan dalam deteksi permasalahan implementasi manajemen mutu sehingga penelitian akan lebih mampu menemukan ukuran mutu pendidikan yang sebenarnya (Judi dkk., 2009). Kriteria yang digunakan dalam analisis FMEA ini diadaptasi dari Narayanagounder & Gurusami (2009) seperti pada Tabel 1.

Proses pengukuran FMEA difokuskan kepada empat hal utama yang merupakan komponen utama dalam proses manajemen RSBI. Keempat komponen tersebut adalah sistem penjaminan mutu sarana dan prasarana pembelajaran, sistem penjaminan mutu proses

belajar mengajar dan evaluasi, sistem penjaminan mutu tenaga pendidik, dan pengembangan kurikulum.

Nilai-nilai sekolah yang dapat mendukung proses penjaminan mutu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis faktor. Teknik ini diharapkan dapat menemukan indikator utama yang dapat dijadikan sebagai standar dalam penjaminan mutu pendidikan.

Penelitian dilaksanakan di dua sekolah yang berstatus RSBI, yaitu SMAN 1 Kota Malang dan SMAN 5 Kota Bandung. Responden penelitian terdiri atas siswa dan guru. Responden siswa berjumlah 285 orang dan responden guru berjumlah 30 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen tertutup. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan terkait pelaksanaan manajemen mutu di kedua sekolah.

Responden siswa terdiri atas responden laki-laki sebanyak 102 (35,8%), responden perempuan sebanyak 180 (63,2%), dan yang tidak memberikan jawaban sebanyak 3 orang (1,1%). Responden yang berasal dari kelas X sebanyak 61 (21,4%), kelas XI sebanyak 151 (53%), kelas XII sebanyak 70 (24,6%), dan yang tidak memberi jawaban sebanyak 3 (0,11%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mutu SMA RSBI

Hasil analisis data kategori *Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran* dari 285 responden siswa, didapat responden memilih jawaban paling banyak pada peringkat 8 sebanyak 24,9% (kemungkinan gagal sangat sedikit), selanjutnya peringkat 9 sebanyak 20,7% (kemungkinan kegagalan dalam jumlah yang langka). Jawaban paling sedikit pada peringkat 1 dan 4 sebanyak 9 orang (3,2%). Hasil selengkapnya terpampang pada Tabel 2.

Tabel 1. Matriks Kriteria Penyebaran Berdasarkan FMEA

Dampak	Peringkat	Kriteria
Hampir tidak pernah	1	Hampir pasti gagal
Sangat jauh	2	Kemungkinan kegagalan sangat tinggi
Sangat sedikit	3	Kemungkinan kegagalan tinggi
Sedikit	4	Kemungkinan gagal dalam jumlah sedang
Rendah	5	Ada kemungkinan gagal sesekali
Sedang	6	Kemungkinan gagal sedikit
Cukup tinggi	7	Kemungkinan kegagalan cukup tinggi
Tinggi	8	Kemungkinan gagal sangat sedikit
Sangat tinggi	9	Kemungkinan kegagalan dalam jumlah yang langka
Hampir pasti	10	Tidak mungkin gagal. Sejarah menunjukkan tidak ada kegagalan.

Tabel 2. Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

	Fre-kuensi	Persen	Persen Valid	Persen Kumulatif
Valid 1	9	3,2	3,2	3,2
10	23	8,1	8,1	11,2
2	20	7,0	7,0	18,2
3	10	3,5	3,5	21,8
4	9	3,2	3,2	24,9
5	11	3,9	3,9	28,8
6	24	8,4	8,4	37,2
7	49	17,2	17,2	54,4
8	71	24,9	24,9	79,3
9	59	20,7	20,7	100,0
Total	285	100,0	100,0	

Sementara itu, dari responden guru diperoleh data yang tidak jauh berbeda, yaitu 46,7% responden memilih jawaban peringkat 9 dan jawaban paling sedikit pada peringkat 2 sebanyak 1 (3,3%).

Data tersebut menggambarkan bahwa persepsi responden terkait sarana dan prasarana yang ada di sekolah sudah cukup baik. Kategori 8 dan 9 banyak dipilih yang menunjukkan bahwa sarana dan prasana di kedua sekolah tingkat kegagalannya sedikit atau langka. Namun, terlepas dari pencapaian tersebut masih terdapat responden yang memilih kategori di bawahnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 yang apabila dijumlah menjadi 20,8 persen. Hal itu menggambarkan bahwa masih terdapat kelemahan pada aspek sarana dan prasana walaupun tingkatannya kecil, namun membutuhkan perhatian dari pengelola sekolah untuk segera memperbaikinya.

Lingkup dari sarana dan prasarana sekolah memang sangat luas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1(8) menyebutkan bahwa “Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi”. Mengingat lingkupnya yang begitu luas maka sangat dimungkinkan terjadi kekurangan disana sini. Sudah sepantasnya pengelola sekolah melakukan pengawasan dan pemeliharaan secara berkala, agar kekurangan terkait sarana dan prasarana dapat segera diatasi.

Hasil analisis data *Mutu Proses Belajar dan Evaluasi* adalah sebagai berikut. Responden siswa yang

memilih jawaban tertinggi adalah kategori 8 sebanyak 22,5% (kemungkinan gagal sangat sedikit), selanjutnya kategori 9 sebanyak 22,1% (kemungkinan kegagalan dalam jumlah yang langka), sedangkan responden siswa yang menjawab sedikit pada peringkat 4 dan 5 sebanyak 5 (1,8%). Hasil selengkapannya dapat dilihat pada Tabel 3. Sementara itu, dari responden guru diperoleh data terbanyak pada jawaban kategori peringkat 9 sebanyak 15 (50,0%), jawaban sedikit pada kategori peringkat 1 dan 7 sebanyak 1 (3,3%) orang.

Mutu proses belajar mengajar merupakan tingkatan mutu yang dicapai dalam kegiatan belajar mengajar yang dipandu oleh seorang guru. Keberhasilan pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kapabilitas seorang guru serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Terlepas dari kapasitas seorang guru, pencapaian mutu pada dasarnya akan sangat bergantung pada semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lunenburg (2010) yang menyatakan “*The quality mission must be internalized by all members of the school organization (school board members, administrators, teachers, support staff, students, parents, community)*”. Pendapat tersebut menegaskan bahwa pencapaian mutu harus menjadi tanggung jawab semua yang terlibat dalam organisasi sekolah, seperti komite sekolah, dinas pendidikan, guru, tata usaha sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat. Keterpaduan di antara semua komponen tersebut akan memudahkan dalam pencapaian mutu proses belajar dan mengajar.

Tabel 3. Mutu Proses Belajar dan Evaluasi

	Fre-kuensi	Persen	Persen Valid	Persen Kumulatif
Valid 1	17	6,0	6,0	6,0
10	32	11,2	11,2	17,2
2	14	4,9	4,9	22,1
3	11	3,9	3,9	26,0
4	5	1,8	1,8	27,8
5	5	1,8	1,8	29,6
6	28	9,8	9,8	39,4
7	46	16,1	16,1	55,5
8	64	22,5	22,5	78,0
9	63	22,0	22,0	100,0
Total	285	100,0	100,0	

Hasil analisis mutu tenaga pendidik dipersepsi siswa dengan jawaban paling banyak kategori 8 sebanyak 59 (20,7%) dan kategori 7 sebanyak 50 (17,5%). Responden yang menjawab sedikit pada peringkat 1 sebanyak 8 (2,8%). Hasil selengkapannya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Mutu Tenaga Pendidik

	Frekuensi	Persen	Persen Valid	Persen Kumulatif
Valid 1	8	2,8	2,8	2,8
10	12	4,2	4,2	7,0
2	20	7,0	7,0	14,0
3	14	4,9	4,9	18,9
4	13	4,6	4,6	23,5
5	29	10,2	10,2	33,7
6	41	14,4	14,4	48,1
7	50	17,5	17,5	65,6
8	59	22,7	22,7	86,3
9	39	13,7	13,7	100,0
Total	285	100,0	100,0	

Sementara itu, responden guru memilih jawaban terbanyak pada kategori 9 sebanyak 11 (36,7%) dan yang paling sedikit jawaban pada kategori 1 sebanyak 1 (3,3%). Berpijak kepada data tersebut terdapat dua pandangan yang sedikit berbeda. Mayoritas siswa memandang mutu tenaga pendidik pada kategori kemungkinan kegagalan cukup tinggi (7) dan kemungkinan gagal sangat sedikit (8) sehingga dapat dinyatakan bahwa mutu tenaga pendidik belum seratus persen memberikan kepuasan kepada siswa. Sementara itu, guru memandang bahwa mutu pendidik sudah sangat baik yang terbukti dengan mayoritas responden memilih kategori “kemungkinan kegagalan dalam jumlah yang langka”.

Tenaga pendidik merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan belajar mengajar. PP No 19 Tahun 2005 Pasal 28 (1) menyatakan “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa pendidik memiliki peran sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Hasil analisis *Mutu Pengembangan Kurikulum* dipaparkan sebagai berikut. Siswa yang menjawab paling banyak pada kategori 8 sebanyak 65 (22,8%), sedangkan yang menjawab paling sedikit pada kategori 4 sebanyak 3 (1,1%). Sementara itu, menurut guru proses pengembangan kurikulum dipersepsi jawaban yang paling banyak pada kategori 9 sebanyak 13 (43,3%) dan jawaban paling sedikit pada kategori 1 sebanyak 1 (3,3%). Secara umum, baik siswa maupun guru memandang telah terjadi proses pengembangan kurikulum. Namun proses tersebut belum berjalan maksimal mengingat lebih dari 20% siswa dan guru memandang masih terdapat kegagalan dalam proses tersebut. Hasil lengkap dapat diamati pada Tabel 5.

Tabel 5. Mutu Pengembangan Kurikulum

	Frekuensi	Persen	Persen Valid	Persen Kumulatif
Valid 1	23	8,1	8,1	8,1
10	45	15,8	15,8	23,9
2	17	6,0	6,0	29,8
3	7	2,5	2,5	32,3
4	3	1,1	1,1	33,3
5	11	3,9	3,9	37,2
6	25	8,8	8,8	46,0
7	45	15,8	15,8	61,8
8	65	22,8	22,8	84,6
9	44	15,4	15,4	100,0
Total	285	100,0	100,0	

Proses pengembangan kurikulum harus terus dilakukan mengingat semakin gencarnya perkembangan teknologi dan informasi. Hamalik (2006) memberikan batasan bahwa paling tidak pengembangan kurikulum dapat dilakukan pada tingkatan sekolah dan kelas. Kepala sekolah dan guru paling tidak melakukan pengembangan kurikulum pada tingkat kelas yang meliputi penyempurnaan metode, desain pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Proses pengembangan yang dimulai dari lingkup kecil lama kelamaan akan membesar dan memiliki dampak yang besar pula pada peningkatan mutu pendidikan.

Nilai-Nilai Sekolah yang Berpengaruh terhadap Penjaminan Mutu Pendidikan

Hasil analisis faktor untuk responden siswa SMAN 1 Malang menunjukkan bahwa data tidak dapat dirotasi sehingga tidak tampak indikator yang dominan di antara pertanyaan yang diajukan. Hasil responden SMAN 5 Bandung dari hasil komponen matrik yang telah dirotasi menghasilkan 5 buah kesimpulan komponen utama. Komponen 1 adalah penegakan aturan dan pencapaian visi sekolah. Komponen 2 adalah komitmen terhadap peningkatan mutu. Komponen 3 adalah komunikasi terbuka. Komponen 4 adalah menerapkan nilai-nilai dan budaya dalam proses pendidikan. Komponen 5 adalah peningkatan profesionalisme guru.

Hasil analisis faktor untuk guru di SMAN 1 Malang, setelah mengalami rotasi menghasilkan 5 kesimpulan utama (komponen). Komponen 1 adalah motivasi dan apresiasi terhadap prestasi dengan memperhatikan nilai-nilai kebaikan. Komponen 2 adalah perbaikan mutu berkelanjutan. Komponen 3 adalah komponen interaksi dalam peningkatan hasil belajar. Komponen 4 adalah *sharing* dalam inovasi pembelajaran. Komponen 5 adalah komitmen tinggi terhadap perbaikan mutu pembelajaran. Responden guru SMAN

5 Bandung dari hasil analisis faktor tidak dapat dirotasi sehingga tidak nampak indikator yang dominan di antara pertanyaan yang diajukan.

Hasil penelitian ini menyatakan terdapat sepuluh nilai-nilai yang dipandang memiliki pengaruh terhadap proses penjaminan mutu pendidikan. Kesepuluh nilai tersebut merupakan hasil pandangan responden siswa dan guru. Nilai-nilai yang dihasilkan ini selanjutnya akan dijadikan sebagai prinsip dalam mengembangkan pola penjaminan mutu pada rintisan sekolah bertaraf internasional. Untuk memudahkan proses pendeskripsian, nilai-nilai tersebut diurutkan berdasarkan sistematika proses pendidikan, menjadi (1) penegakan aturan dan pencapaian visi sekolah; (2) peningkatan profesionalisme guru; (3) komitmen tinggi terhadap perbaikan mutu pembelajaran; (4) komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan; (5) perbaikan mutu berkelanjutan; (6) komunikasi terbuka; (7) nilai-nilai dan budaya sebagai landasan dalam proses pendidikan; (8) interaksi dalam peningkatan hasil belajar; (9) *sharing* dalam inovasi pembelajaran; dan (10) motivasi dan apresiasi terhadap prestasi siswa.

Kesepuluh nilai tersebut selanjutnya dijadikan sebagai prinsip penjaminan mutu pendidikan. Pola konseptual yang disusun didasarkan atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Pola yang dikembangkan meliputi tiga kelompok utama manajemen persekolahan, yaitu nilai-nilai yang berkenaan dengan

tata aturan sekolah, nilai-nilai yang berkenaan dengan personal pendidik, dan nilai-nilai terkait proses belajar mengajar. Kategorisasi tersebut didasarkan atas pengelompokan sepuluh nilai hasil penelitian.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya responden memandang pelaksanaan proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, mutu tenaga pendidik, dan pengembangan kurikulum berada pada kategori “kemungkinan gagal sangat sedikit” dan “kemungkinan kegagalan dalam jumlah yang langka”. Hal itu menunjukkan bahwa lapangan penelitian secara umum telah memiliki kualitas baik. Kondisi ini merupakan modal awal bagi pengelola sekolah untuk meningkatkan kualitas lebih baik lagi sehingga setara dengan kualitas pendidikan yang dimiliki negara maju.

Ditemukan sepuluh nilai-nilai sekolah yang dipandang relevan dengan proses penjaminan mutu pendidikan. Kesepuluh nilai tersebut dapat dijadikan sebagai prinsip dasar pengembangan mutu pendidikan, baik pada lembaga pendidikan yang berstatus RSBI maupun lembaga pendidikan yang berstatus SSN. Sepuluh nilai tersebut juga dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan mengingat secara umum komponen pendidikan pada semua jenjang adalah sama.

DAFTAR RUJUKAN

- Crenova. 2000. *Materi Pelatihan Standar Internasional ISO 9001:2000 (Sistem Manajemen Mutu): Meningkatkan Daya Saing sebagai Kunci Memasuki Era Global*. Malang: Crenova.
- George J.M. & Jones, G.R. 1996. *Understanding and Managing Organizational Behaviour*. Massachusetts: Wesley Publishing Company.
- Hamalik, O. 2006. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jawa Pos. 4 Januari, 2012. *Cara Lain SMK Memperbaiki Kualitas*. Jawa Pos, (Online), (<http://www.jawa-pos-online.com>), diakses 18 Februari 2012.
- Judi, H.M., Jaenal, R., & Genasan, D. 2009. Some Experiences of Quality Control Implementation in Malaysian Companies. *European Journal of Scientific Research*, 27 (1): 34-45.
- Kompas. 29 Januari, 2012. Sekolah RSBI Dinilai Gagal. *Kompas Online*, (Online), (<http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/29/20235661/Sekolah.RSBI.Dinilai.Gagal>), diakses 29 November 2012.
- Lunenburg, F.C. 2010. Total Quality Management Applied to Schools. *Schooling Journal*, 1 (1): 1-6.
- Maryati. 2007. Menyoal Profile Sekolah Bertaraf Internasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13 (67): 1-37.
- Narayanagounder, S. & Gurusami, K. 2009. A New Approach for Prioritization of Failure Modes in Design FMEA using ANOVA. *Journal World Academy of Science, Engineering and Technology*, 2008 (49): 486-493.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.